Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial
ISSN: 2615-4668 (Online) 2579-7050 (Printer)
V0l. 5, No. 1 (2021); pp.43- 64

PERTAHANAN NEGARA, REALITAS SOSIAL KEAGAMAAN, DAN ANCAMAN NON-MILITER DI YOGYAKARTA

[*1]Edy Santosa , [2]Moh Soehadha, [3]Heri Supriyanto
[1]Brigjen TNI., Markas Besar TNI Angkatan Darat, Indonesia
[2] Program Studi Sosiologi Agama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
[3] Letkol Caj., Direktorat Jenderal Strategi Kementerian Pertahanan RI, Indonesia
*Santosedy099@gmail.com, Soehadha16@gmail.com, Heri.45@yahoo.com

Artikel History
Submit: 20 Januari 2021
Review: 14 Februari 2021
Revised: 26 April 2021
Accepted: 28 Mei 2021

Abstract: The concept and strategy of national security of Indonesia includes the resilience of all areas of the country against military and non-military threats. From a sociological perspective, non-military threats exist in a dynamic social and environmental world and are constantly changing in form. Non-military threats have a broader dimension, including ideological, social, economic, cultural, political, information technology and public safety. Various facts about regional conditions and socio-religious dynamics in the Special Region of Yogyakarta are indicators that show a source of problems as a potential non-military threat. The article from the field research using the following qualitative method contains an interpretive description of various non-military threats from internal conditions, as well as external influences. Internal conditions are caused by the Yogyakarta region which is directly adjacent to the Indian Ocean, the ring of fire area, and the city of study and tourism destinations. As for the external conditions for non-military threats, among others, due to the influence of globalization, geopololitical conditions, ideological flows such as radicalism and massive caiptalization from outside Indonesia. There are three forms of non-military threats in Yogyakarta that urgently need a strategy to respond and resolve them. The three non-military therats are religious radicalism, narcotics and illegal drugs, as well as the negative impact of virtual culture; such as the rise of hate and hoaxes that can damage unity, because it causes discord of the nation.

Keywords: Non-Military Threats, National Security, Social Religion,Yogyakarta

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, adalah satu kesatuan wilayah yang terhampar luas dari Sabang di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) sampai ke Merauke Propinsi Papua. Indonesia disebut pula dengan nama Nusantara, yaitu sebagai negara kepulauan dengan wilayah paling luas di dunia karena terdiri dari 17.000 lebih pulau. Menurut data BPS (2019) dengan populasi 270, 20 juta jiwa atau 3,5 % dari penduduk dunia, Indonesia menempati ranking keempat dalam hal jumlah populasi penduduk dunia setelah China, India, dan Amerika serikat (CIA

World Factbook, 2016). Disebut pula sebagai negara multikultural, karena dicirikan oleh karakter penduduk dengan berbagai latar belakang suku, agama, bahasa dan budaya (Rozi, 2003).

Dalam perspektif pertahanan negara, realitas sosiologis keindonesiaan tersebut, di satu sisi memberi kemudahan menjadi bangsa yang maju dan disegani bangsa-bangsa lain, namun pada sisi yang lain potensial memberi ancaman terhadap perdamaian yang menyebabkan rapuhnya kedaulatan negara. Dinamika perkembangan ancaman semakin kompleks dan bersifat multidimensional, baik ancaman militer maupun ancaman non-militer (Kementerian Pertahanan, 2015). Sesuai sistem pertahanan negara sebagaimana termuat pada pasal 7 dan 8 di dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2002, bahwa untuk menghadapi ancaman militer ditempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai unsur atau komponen utama, dan didukung oleh unsur cadangan dan unsur pendukung.

Ancaman non-militer memiliki dimensi yang lebih luas, meliputi ideologi, sosial, ekonomi, budaya, politik, teknologi informasi, dan keselamatan umum (Indrawan, 2016: 159). Ancaman non-militer lekat dengan keseharian, menjadi bagian dari hidup sehari-hari (everyday life) rakyat Indonesia. Secara sosiologis ancaman non-militer ada dalam dinamika sosial, terus berubah atau berkembang wujudnya dari waktu ke waktu. Ancaman non-militer begitu cair, sulit dideteksi, lebih kompleks dan pelik, karena cenderung tidak nampak secara konkret, dan dalam banyak hal tidak secara langsung dapat dirasakan pengaruhnya. Meskipun tidak konkret, tetapi ancaman militer masuk ke dalam berbagai ranah kehidupan individu maupun kehidupan kolektif. Untuk menghadapi ancaman non-militer yang kompleks dan multidimensi, diperlukan sinergitas semua unsur masyarakat.

Berbagai bentuk ancaman non-militer bisa masuk ke semua ranah kehidupan dan sering tidak disadari oleh masyarakat dan individu. Ancaman nonmiliter menjadi lebih mengemuka dalam sistem pertahanan negara, karena melekat dalam dinamika kehidupan bangsa yang dinamis. Bentuk-bentuk ancaman nonmiliter dapat dikendalikan oleh agensi atau aktor negara maupun bukan negara, baik dari dalam maupun luar negeri dengan memanfaatkan jejaring antar negara, serta didukung oleh teknologi dan finansial sehingga memberi pengaruh pada aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, keselamatan umum, dan teknologi serta legislasi suatu bangsa (Kementerian Pertahanan, 2015).

Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pelajar, kota sejarah perjuangan, dan kota budaya dapat menjadi miniatur tentang kondisi Indonesia. Di samping itu Yogyakarta

juga digambarkan sebagai wilayah propinsi dengan populasi yang multikultural dan multi agama, menjadi wilayah "cincin api" yang punya karakter rawan bencana alam, serta pada sisi laut selatan menjadi salah satu daerah yang memiliki wilayah berbatasan dengan negara lain. Sehingga Yogyakarta dapat menjadi potret wilayah di Indonesia yang mengandung potensi ragam bentuk ancaman non-militer. Fakta sosial keagaman dan kondisi geografis Yogyakarta, dapat menjadi sumber dari prakondisi ketidakdamaian (peacelessness) yang menjadi ciri dari ancaman non-militer. Artikel ini memberi paparan tentang potensi ancaman non-militer di Indonesia, dengan mengambil kasus di Yogyakarta.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi lapangan (field research) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif . Hasil penelitian dirumuskan dalam bentuk paparan deskriptif dengan mendasarkan pada fakta hasil pengamatan, diskusi terfokus, wawancara, dan data dokumentasi yang relevan dengan masalah penelitian. Wilayah kajian dalam studi ini adalah Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Namun demikian ruang lingkup kajian dapat diperluas ke luar wilayah DIY, ketika aspek-aspek yang berada di luar wilayah DIY tersebut dapat mempengaruhi kondisi sosial, politik, dan keamanan di wilayah DIY. Arus global yang secara masif menjadi kecenderungan dari kondisi dunia saat ini, menyebabkan sebuah studi tidak mungkin dapat mengabaikan analisis yang meibatkan faktor global. Ideologi, unsur budaya, dan juga jaringan ekonomi yang bersifat merusak sendi kehidupan negara seperti narkotika dan obat terlarang tentu tidak hanya melibatkan aspek lokal.

Pengumpulan data dilakukan dengan menekankan pada empat teknik, yaitu wawancara, diskusi kelompok terfokus, pengamatan, dan dokumentasi. Interview dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan pedoman wawancara, yaitu membuat kerangka dan garis-garis besar yang ditanyakan dalam proses wawancara. Selain terhadap individu secara terpisah, wawancara juga dilakukan melalui diskusi kelompok terfokus (Focussed Group Discussion/ FGD). Teknik pengumpulan data ini dilakukan untuk menjaring berbagai isue terkait potensi kerawanan, dan sumberdaya manusia serta nilai-nilai kemasyarakatan di DIY yang bisa dikembangkan sebagai bagian dari penyelesaian terhadap potensi ancaman non-militer yang ada.

FGD dilakukan terhadap berbagai unsur kelembagaan, baik pemerintah maupun non pemerintah, komunitas lokal, LSM, akademisi, dan unsur lainnya yang dipandang relevan dengan tujuan penelitian ini. Teknik observasi dilakukan dengan cara mengamati kejadian-kejadian keseharian (everyday life) masyarakat di Yogyakarta. Instrumen dari pengamatan adalah pedoman pengamtan dan peralatan seperti kamera, video, serta alat perekam suara. Adapun teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji dokumen antara lain yang bersumber dari instansi dan kantor pemerintahan di Yogyakarta, surat kabar online dan cetak, serta data dokumentasi lainnya yang dianggap relevan dengan kajian ini. Data yang dikumpulkan pada pengkajian ini diolah secara deskriptif interpretif sesuai dengan tujuan pengkajian. Adapun teknik yang digunakan untuk mengolah data dalam pengkajian ini adalah dengan pemrosesan dan kategorisasi. Analisis data diawali dengan display, abstraksi, dan reduksi data hasil pengamatan, wawancara, diskusi kelompok, dan dokumentasi (Miles and Huberman, 1994).

Hasil Penelitian

A. Konseptualisasi Ancaman Non-Militer

Dalam perspektif sosiologis, ancaman non-militer ada dalam dunia sosial dan lingkungan yang selalu *emergent* dan *processual* (Taylor & Bogdan, 1984: 9), dinamis dan terus berubah wujudnya. Ancaman non-militer selalu ada di dalam kondisi masyarakat yang diwarnai oleh munculnya hal-hal yang baru dan peradaban yang terus berproses. Oleh karena itu, analisis terhadap ancaman non-militer harus dilakukan dengan mengkontekstualisasikannya dengan perkembangan zaman.

Ancaman non-militer lekat dengan keseharian, menjadi bagian dari hidup sehari-hari (*everyday life*). Begitu cair, sulit dideteksi, lebih kompleks dan pelik, karena cenderung abstrak dan tidak secara langsung terasa pengaruhnya. Ancaman Non-Militer bisa masuk ke semua ranah kehidupan, sering tidak disadari oleh masyarakat dan individu.

Sejalan dengan pemahaman sosiologis di atas, dalam perspektif pertahanan negara, perkembangan lingkungan strategik pada dekade terakhir ini, telah memunculkan berbagai perkembangan baru (Naryadi, 2005: 9). Telah lahir ragam ancaman model baru yang sulit dikategorikan ke dalam konseptualisasi klasik tentang keamanan. Konsep keamanan dalam tradisi klasik dibagi dalam lima fungsi pokok, yaitu fungsi keselamatan bangsa, fungsi pertahanan negara, fungsi penegakan hukum, ketertiban masyarakat dan ketertiban umum serta fungsi perlindungan masyarakat.

Pada masa perang dingin terdapat pemahaman atau persepsi bahwa ancaman keamanan dari setiap negara diformulasikan secara terpisah. Artinya bahwa dalam masa perang dingin ancaman terhadapnegara hanya dipahami sebagai ancaman militer, yaitu agresi teritorial yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain dalam konteks perang ideologi antara blok barat dan blok timur sehingga mengancam keamanan nasional. Adapun pada masa setelah perang dingin, yaitu setelah ancaman militer mulai berkurang dan digantikan oleh ancaman non-militer antara lain berupa teror, narkoba, perdaganan manusai dan senjata (*human and small arms trafficking),* pencucian uang (*money laundering*), dan kejahatan digital (*cyber crime*), maka pemahaman terhadap ancaman pertahanan suatu negara telah mengalami perluasan. Berbagai ancaman tersebut disebut juga sebagai tindak kriminal terorganisir antar negara *(trans national organized crime).*

Berbagai ancaman di atas lebih sering langsung mengancam keamanan manusia, maka menjadi peringatan tentang perlunya *human security* (keamanan manusia) sebagai pengganti konsep *national security* (keamanan nasional). Hal itu terjadi karena di banyak negara, seperti Indonesia, belum dipahami benar fungsi perlindungan masyarakat. *Human security* menjadi kebutuhan dan menjadi agenda baru keamanan global setelah masa perang dingin, sehingga tidak hanya fokus pada isu keamanan dalam bentuk ancaman militer, namun memperluas fokus pada isu keamanan yang muncul dari agensi atau pelaku non-negara *(non-state actor).*

Pengertian ancaman non-militer dengan demikian juga dapat dikaitkan dengan konsep "perdamaian baru" yang dikaitkan dengan kondisi "peacelessness". Konsep tersebut mengacu pada situasi terutama di negara berkembang, yang digambarkan bahwa meskipun tidak ada perang, manusia menderita karena kemiskinan, kekurangan gizi, penyakit, buta huruf, diskriminasi, penindasan dan sebagainya, karena perang (Dasgupta, 1968). Oleh karena itu ancaman non-militer pada hakikatnya adalah kondisi di luar perang militer, namun terdapat situasi yang memicu ketiadaan perdamaian sebagai akibat adanya masalah di bidang sosial. Konsep Dasgupta (1968) tentang nilai-nilai perdamaian baru tersebut meliputi aspek kemakmuran ekonomi dan kesehatan fisik. Keduanya dimasukkan ke dalam konsep perdamaian sebagai komponen atau kondisi yang diperlukan perdamaian. Konsep *peacelessnes* kemudian mengakhiri pengertian ketiadaan perang antarnegara sebagai satu-satunya syarat perdamaian (Matsuo, 2005).

Jadi dalam konsep ancaman non-militer terdapat asumsi bahwa konsep keamanan sebagaimana ada dalam studi keamanan (Buzan, et al., 1998: 2), diperluas tidak hanya

berupa sumber militer dari ancaman konflik bersenjata, tetapi juga sumber non-militer seperti degradasi lingkungan (pemanasan global, kelangkaan yang terbarukan dan tidak terbarukan sumber daya dan sejenisnya), kerusakan ekonomi domestik yang disebabkan masalah kapitalisme internasional, kejahatan terorganisir seperti perdagangan narkoba, pelanggaran hak asasi manusia besar-besaran, populasiledakan, pengungsi dan migrasi penduduk yang tidak terkendali, penyakit menular. Pemahaman tentang ancaman non-militer dengan pengertian dan indikatornya seperti itulah yang diterapkan dalam kajian tentang ancaman non-militer di Yogyakarta dalam artikel ini.

B. Kondisi Yogyakarta

Secara historis dan sosiologis, realitas sosial di Yogyakarta selalu menarik dan penting dikaji. Selain tercatat dalam sejarah sebagai ibukota kerajaan Mataram yang telah tumbuh menjadi kota modern, Yogyakarta pernah tercatat dalam sejarah sebagai ibukota Indonesia di tahun 1946 – 1950. Yogyakarta dikenal sebagai basis revolusi rakyat, dan menjadi motor ragam perubahan sosial politik, sehingga berkembang ke seluruh Indonesia. Yogyakarta juga dianggap sebagai barometer stabilitas nasional (Soemardjan, 1982; Khairuddin, 1995; Dinas Kebudayaan DIY, 2015).

Yogyakarta masa kini dapat digambarkan sebagai kota modern yang memiliki penduduk dengan kondisi sosial budaya yang heterogen dari sisi etnis, agama, matapencaharian, dan aspek sosial budaya lainnya. Woodward (2000:31) menggambarkan bahwa, meskipun di beberapa sisi perkotaan telah lama berkembang aktivitas perdagangan modern, namun di banyak sudut kota lainnya masih terdapat aktivitas perdagangan tradisional yang ragam kebutuhan masyarakat. Gambaran tentang bidang pekerjaan perdagangan, antara lain dapat ditemukan di wilayah Kauman. Kauman yang dulu dirancang oleh Sultan Hamengkubuwono I sebagai wilayah *santri*, merupakan perkampungan yang dihuni penduduk yang banyak menggantungkan hidupnya pada matapencaharian perdagangan.

Kini hampir seluruh wilayah di Yogyakarta menununjukkan perkembangan pariwisata yang sangat pesat. Masyarakat di semua wilayah, pedesaan, perkotaan, maupun pesisir pantai mengembangkan wilayah mereka sebagai salah satu tujuan destinasi wisata. Para wisatawan dapat menikimati munculnya pantai-pantai baru, desa wisata, dan juga wisata alam yang baru. Dari sisi ekonomi perkembangan wisata yang pesat di DIY telah memberikan harapan baru akan sumber pendapatan bagi penduduk. Namun demikian menurut Mardirukmianto (2017, https://www.solopos.com/)

perkembangan pariwisata yang pesat juga membawa dampak pada bidang sosial dan kebudayaan, serta meningkatnya kriminalitas seperti peredaran narkoba yang terus meningkat.

Dari sudut letak geografis dan bentang alam, Yogyakarta dihadapkan dengan posisi yang terdiri dari pegunungan, perbukitan, dataran rendah serta berada dekat dengan lempeng Indo Australia dan lempeng Eurasi sehingga terbentuk deretan gunung berapi. Di anatara gunung berapi yang berada di wilayah Yogyakarta dan masih aktif adalah Gunung Merapi. Sebagai akibat dari letak geografis tersebut menyebabkan Yogyakarta rawan terhadap berbagai macam bencana alam, seperti letusan gunung, gempa dan Tsunami, tanah longsor, banjir dan angin puting beliung.

Sebagai daerah tujuan belajar generasi muda di Indonesia, Yogyakarta dianggap rawan terhadap perkembangan radikalisme keagamaan. Perguruan tinggi dianggap menjadi sasaran utama dari perkembangan gerakan radikalisme keagamaan. Berdasarkan kesimpulan kajian Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gajah Mada (UGM) tentang perubahan sosial dan potensi konflik, ditemukan fakta bahwa indeks potensi konflik yang bersumber dari premanisme meningkat. Pertumbuhan ekonomi diasumsikan sebagai penyebab dari tingginya indeks potensi konflik tersebut, sehingga aksi kekerasan yang bersumber dari aktivitas premanisme harus terus diwaspadai (https://cpps.ugm.ac.id/media-archives).

C. Ragam Ancaman Non-militer di Daerah Istimewa Yogyakarta

Ancaman non-militer harus dilihat secara menyeluruh melibatkan dua faktor sekaligus, internal maupun eksternal. Fakta di Yogyakarta menunjukkan bahwa ancaman non-militer tidak hanya muncul dari kondisi riil internal Yogyakarta, namun juga disebabkan oleh pengaruh eksternal seperti globalisasi, turbulensi geopolitik, arus ideologi seperti radikalisme, dan kapitalisasi yang masif dari luar wilayah DIY dan luar Indonesia. Hasil analisis menunjukkan peta ancaman non-militer di Yogyakarta sebagai berikut.

Ideologi Global Kontemporer

Fenomena fundamental yang terjadi di era milenium ketiga telah mengubah cara pandang dan wacana politik, keamanan dan pertahanan. Perkembangan demokratisasi di negara-negara berkembang, kemajuan teknologi informasi, salingketergantungan anatar

negara menjadi penyebab hal tersebut. Globalisasi telah mengubah secara drastis pola lama hubungan antar negara, sehingga berpengaruh terhadap perubahan peta politik dalam negeri. Kondisi tersebut secara langsung maupun tidak langsung juga mengakibatkan dinamika politik di dalam negeri, sehingga dapat mempengaruhi "keamanan nasional" suatu negara.

Ketika globalisasi gelombang ketiga menghantam Indonesia pada tahun 1980-an, yaitu saat kapitalisme menjadi kekuatan utama perubahan global, sudah mulai terjadi perubahan multifaset yang cukup berpengaruh bagi negara-negara dunia ketiga seperti Indonesia. Arus global dengan mesin utama kapitalisme, sebenarnya sudah dibaca secara kritis pada awal tahun tujuhpuluhan di kalangan ilmuwan sosial, antara lain dapat dipelajari dari tulisan Wallerstein (1975), bahwa globalisme berkaitan dengan perkembangan sistem kapitalisme dunia yang telah dirancang dan dikondisikan oleh beberapa negara inti (core state), yaitu negara maju Amerika Serikat dan beberapa negara di Eropa Barat.

Tantangan budaya Indonesia kini cenderung dipengaruhi oleh ideologi globalisme yang diciptakan barat tersebut, dengan kapitalisasi sebagai motornya. Globalisasi dipahami sebagai perkembangan peradaban yang menekankan pada aspek ekonomi dan sosial budaya (Eriksen, 2010). Karakter ekonomi dari golbalisasi menyebabkan meningkatnya aktivitas ekonomi antar negara. Namun aktivitas ekonomi antar negara itu didominasi hanya oleh sedikit "tangan", sehingga terdapat jarak atau jurang jurang yang makin melebar dari kondisi kesejahteraan antara negara maju dengan negara berkembang dan negara miskin. Negara-negara maju atau negara inti (*core states*) semakin mendominasi negara berkembang dan miskin sebagai negara pingiran (*periphery states*)

Secara politis, arus masif globalisasi yang diiringi dengan arus ideologi liberal telah menyebabkan banyak negara, seperti halnya Indonesia harus mewaspadai realitas sosial politik yang menyebabkan adanya ancaman terhadap kedaulatan negara. Pengaruh negatif globalisasi dapat menyebakan perpecahan di sebuah negara dan ambruknya negara tersebut, seperti Rusia dan Yugoslavia. Indonesia bisa mengambil pelajaran dari kasus tersebut, terutama karena karakternya yang terdiri dari ragam populasi multietnik dan agama. Pengaruh negatif globalisasi menjadi salah satu ancaman non-militer. Ideologi transnasional dan separatisme dapat mudah masuk karena pengaruh global. Indonesia dengan populasi yang multikultural, dan sebagai negara kepulauan rentan terhadap ideologi yang dapat memecah persatuan negara.

Pergeseran Geopolitik

Perkembangan teknologi informasi yang pesat dan industrialisasi merupakan karakter yang dibawa oleh globalisasi, sebagai alat penguasaan ekonomi. Banyak negara maju menyadari bahwa penguasaan aset ekonomi lebih penting dari sekedar penguasaan geografis suatu negara terhadap negara lain secara politik. Sebagai akibatnya penguasaan geopolitik mengalami perubahan fokus, dari politik ke ekonomi. Integrasi ekonomi antar negara lebih ditekankan, dengan cara mengembangkan pasar bebas dunia sebagai bagian dari strategi neoliberalisme (Jackson & Sorensen 1999, 79; Leonard, 2015: 4).

Namun dalam perkembangan kini, negara-negara di eropa dan amerika sebagai pelopor neoliberalisme justru keberadaannya mulai tergeser dalam peta geopolitik. Masyarakat global dihadapkan pada pergeseran geopolitik dunia, yaitu dari peradaban *anglo-saxon* (barat) ke mongolian (timur). Secara berangsur Cina mulai menggeser kedudukan AS dalam peta geopolitik dan ekonomi global. Negara lainnya di timur, seperti India, Jepang, dan Korea diperkirakan juga dapat menjadi kekuatan geopolitik utama pada tahun 2030. Demikian pula dengan Indonesia, jika dapat memanfaatkan peluang, pada tahun 2040 dapat menjadi lima besar dalam peta geopolitik dunia. Bonus demografi dan berabagi karakter penduduk Indonesia yang mirip China, bisa menjadi modal dalam meraih posisi dalam peta geopolitik dunia (Sudibyo, 2013).

Apabila Indonesia tidak mampu menangkap peluang dalam pergeseran peta deopolitik tersebut, maka Indonesia hanya sebagai sasaran produk cina saja. Indonesia hanya akan menjadi pasar, bukan sebagai produsen. Derasnya arus produk Cina yang murah dan terjangkau, secara berangsur menggantikan produk Indonesia yang akan menghilang di pasar internasional maupun dalam negeri. Seiring derasnya produk ekonomi Cina, juga dibarengi dengan masuknya ancaman ideologi, budaya, narkoba, dan sebagainya.

Derasnya arus produk Cina dan jepang yang masih bertahan dalam kasus di Yogyakarta juga memberi ancaman bagi produk lokal. Sebagai contoh di Kalasan Yogyakarta sebenarnya telaah muncul produk motor lokal yang cukup berkualitas. Namun demikian industri motor lokal ini sulit berkembang, karena kalah bersaing dari sisi pemasaran dengan produk motor impor. Dalam bidang pertanian, perubahan geopolitik juga telah mengancam produk pangan lokal. Boleh jadi Yogyakarta yang saat ini telah mampu memenuhi produk pangan dari hasil petani lokal, pada kesempatan

mendatang akan berbalik mengimpor bahan pangan dari luar negeri. Kasus atau isu produk beras Cina yang berbahan plastik ditemukan di beberapa pasar di Indonesia beberapa waktu lalu juga menunjukkan bagaimana arus komoditas dari Cina begitu masif, dan sering menjadi ancaman bagi Indonesia dari sisi ekonomi.

Di balik ancaman non-militer dari perubahan geopolitik ke China, sebenarnya ada hal yang secara positif dapat dipelajari dari pergeseran geopolitik (Soehadha dalam harian KR, 6/8/2013). Konfusianisme sebagai akar falsafah budaya Cina menjadi etos bagi orang Cina dalam mengembangkan kewirausahaan. Cina melakukan penafsiran kembali terhadap ideologi sosialisme, dan mengkontektualisasikannya dengan ideologi kapitalisme global. Sehingga elemen utama kapitalisme global seperti pasar bebas, perdagangan terbuka, dan investasi asing diserap ke dalam strategi ekonomi Cina. Cina juga membangun sistem pendidikan mereka dengan menekankan pada penguasaan teknologi, mengembangkan pertanian dengan teknologi canggih, namun tetap berpusat pada ekonomi kerakyatan. Pemerintah yang berkuasa terus membangun stabilitas politiknya dengan membentuk pemerintahan yang kuat.

Radikalisme Keagamaan dan Neoliberalisme

Perkembangan peradaban global telah mendorong perkembangan ideologi dari luar yang bertentangan dengan Pancasila. Disamping pengaruh ideologi global, perkembangan era reformasi yang mendukung kebebasan berpendapat pada satu sisi, namun pada sisi lain telah melahirkan anggapan dari kalanagan tertentu yang negatif bahwa Pancasila sebagai ideologi tertutup.

Kondisi Indonesia menjelang dan pada masa reformasi secara sosiologis mirip situasi *anomie*, yaitu tiadanya nilai-nilai yang dipercaya masyarakat menjadi pedoman. Sebagian rakyat seperti kehilangan pedoman, sehingga mempertanyakan ulang ideologi Pancasila. Rakyat larut dalam efuria kebebasan berpendapat, sehingga banyak celah bagi penyebaran ideologi asing, di antaranya neoliberalisme. Neoliberalisme menekankan pada fundamentalisme pasar, membuat banyak negara berkembang bertekuk lutut di hadapan kepentingan ekonomi asing. Ideologi lainnya yang cukup mengalami perkembangan di Indonesia adalah ideologi fundamentalisme keagamaan atau ideologi radikal kanan.

Baik neoliberalisme maupun ideologi radikal kanan secara nyata berpotensi untuk menghancurkan sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Neoliberalisme menghancurkan sendi-sendi ekonomi kerakyatan, komunalisme dan nilai gotong royong. Neoliberalisme

juga telah nyata membuat masyarakat ada dalam euforia kebebasan, sehingga membuat masyarakat selalu berpolemik, terbelah, dan saling berhadap-hadapan.

Sementara itu ideologi radikalisme keagamaan berujung pada meningkatnya aksi teror yang tidak hanya merusak secara fisik, tetapi juga menimbulkan korban jiwa, depresi dan traumatik bagi korban teror. Paham radikalisme Islam menjadi "legitimasi ideologis" teroris dalam menjalankan aksinya yang berdampak pada pudarnya kebersamaan atau solidaritas serta ketidakpercayaan terhadap pemerintah (Wardlaw, 1982). Berbagai kejadian di berbagai daerah, seperti peristiwa bom di Bali dan bom di Hotel Jw Marriot menunjukkan gambaran tentang pengaruh aksi terorisme itu.

Wujud radikalisme keagamaan lainnya adalah sikap eklusifisme yang ada dalam beberapa kelompok aliran agama. Acapkali mereka menganggap aktivitas kelompoknya merupakan ideologi alternatif yang dapat menggantikan ideologi yang ada, serta mengganti rezim kekuasaan yang sah (Rubaidi, 2008: 34). Dengan dalih jihad melawan kemunkaran, merubah sistem pemerintahan yang kafir, menegakkan agama, dan atas nama tuhan seseorang dapat membunuh orang lain, melawan hukum, membakar rumah ibadah dan simbol keagamaan lainnya, merusak fasilitas publik, serta melakukan teror pada banyak orang. Dalam kaidah hukum di Indonesia dan juga kaidah syariat agama-agama yang hidup di Indonesia, semua bentuk radikalisme adalah ancaman bagi ideologi negara Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan.

Berbagai paham yang mengarah ke radikalisme keagamaan, sering menjadikan mahasiswa di kampus sebagai agen penyebaran. Yogyakarta sebagai daerah favorit tujuan belajar, tentu menjadi bagian dari sasaran penyebaran radikalisme tersebut. Persebaran paham tersebut marak terjadi dengan memanfaatkan kelemahan dari ketahanan kepribadian mahasiswa (Tim Peneliti UIN Sunan Kalijaga, 2011)

Virtual Culture: *Hate Speech*, Isu *Hoax,* Intoleransi, dan Penipuan Online

Teknologi informasi melalui internet telah membentuk dunia lain dalam kehidupan masyarakat manusia di samping dunia nyata, yang disebut sebagai dunia maya atau dunia virtual. Menurut Castells (2010) internet merupakan kekuatan dari adanya *computer-mediated communication* (CMC), menjadi penghubung dari hampir seluruh jaringan komputer. Berdasarkan data yang ada, pada tahun 1999 sebanyak 63 juta internet telah

terkoneksi dari komputer, 3.6 juta *web sites* telah terbentuk, dan telah digunakan oleh 179 juta orang dari 200 negara.

Dalam kultur maya (*virtual*) perkembangan teknologi informasi linimasa (media sosial) dalam beberapa hal menyebabkan munculnya masalah, terutama merebaknya ujaran kebencian dan berita palsu (*hoax*). Sejak tahun 2009 hingga kini, *instagram, twitter*, *washapp, facebook, path,*, dan media sosial/ lini masa lainnya telah melahirkan dunia maya sebagai dunia yang lain di samping realitas dunia nyata. Kehadiran dunia maya dalam beberapa aspke cukup mengkhawatirkan, karena ampir 50% *wall facebook* berisi berita palsu, kata-kata kasar atau ujaran kebencian (Repller sebagimana dikutip Majalah Hadila, 2017).

Meskipun pemerintah telah merespon perkembangan media masa dan teknologi informasi melalui Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan menetapkan sanksi pidana yang berat bagi pengguana media masa yang melakukan *hate speech*, namun kasus-kasus tentang hal tersebut masih terus terjadi. Bahkan media sosial juga menjadi wadah dari sikap intoleransi dan radikalisme. Banjir informasi dari website yang berpaham radikal melahirkan sumber pengetahuan dan otoritas baru melalui media maya (Iqbal Asnaf, 2016),.

Berkembangnya *hoax* dan ujaran kebencian di media sosial menjadi ancaman tersendiri bagi ketahanan NKRI. Melalui ujaran kebencian dan berita *hoax*, rakyat mengalami keterbelahan secara sosial dalam banyak kepentingan, sehingga dapat menimbulkan konflik horisontal dan anarkis. Melalui media sosial orang begitu mudah menghasut dan memobilisasi masa untuk kepentingan tertentu dan berakibat negatif pada munculnya konflik yang bernuansa suku, agama, ras, dan golongan (SARA). Sebagaimana dilansir harian online kompas.com (26/03/2017), di tahun 2015, tercatat laporan ke polisi sejumlah 671 kasus ujaran kebencian. Tahun 2016, jumlah laporan tertinggi *hate speech* terkait SARA. Ujaran kebencian itu meliputi pencemaran nama baik, pelecehan, fitnah, provokasi, dan ancaman. Adapun kejahatan berupa penipuan *online* sejumlah 639 kasus menempati urutan kedua.

Ancaman Gunung Merapi dan Samudera Hindia

Menurut laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB, 2016 mengutip dari Arnold, 1986)), Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kegempaan yang tinggi di dunia. Intensitas kegempaan di beberapa wilayah Indonesia itu lebih darisepuluh kali lipat kegempaan di Amerika Serikat. Kondisi

tersebut disebabkan karena Indonesia berada di tengah lingkaran wilayah cincin api (*ring of fire*) Pasifik, yang dicirikan oleh intensitas tinggi kasus gempa bumi dan letusan gunung berapi. Jalur Cincin Api di Indonesia juga dicirikan oleh keberadaan 400 gunung api, dan 130 diantaranya adalah gunung berapi aktif.

Salah satu daerah yang dapat disebut berada dalam bayang-bayang bencana geologis (*geological hazards*) adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta berada ditengah-tengah himpitan anatara Samudera Hindia di selatan dengan Gunung Merapi di utara. Gunung Merapi hingga kini masih tercatat sebagai gunung api aktif di Indonesia, paling sering meletus. Letusan gunung Merapi mulai tercatat secara hsitoris sejak tahun 1768. Jarak selang waktu erupsi Gunung Merapi terjadi antara 2-5 tahun dalam periode pendek atau 5-7 tahun dalam periode menengah.

Erupsi besar gunung Merapi terjadi pada 2006 dan 2010. Pada 2006, erupsi gunung Merapi berlangsung dari bulan April hingga Juni. Lebih dari 22.000 orang harus dievakuasi ke tempat radius aman. Sedangkan erupsi besar terkahir Merapi terjadi pada 2010. Erupsi yang terjadi dari 25 Oktober hingga awal Desember 2010 mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, 353 orang tewas akibat awan panas. Lebih dari 350.000 orang diungsikan dan sebaran abu vulkanik mencapai radius 20 km, bahkan menyebabkan Bandara International Adi Sucipto ditutup (Wijoyono, 2016). Hal ini membuat gunung Merapi sebagai sumber penghidupan, sekaligus bagi penduduk di sekitarnya adalah ancaman yang sulit diprediksi datangnya.

Ancaman bencana alam lainnya datang dari Samudera Hindia yang berada di selatan Yogyakarta. Ancaman berupa gempa bumi dan tsunami potensial dialami oleh Yogyakarta. Tercatat sebanyak empat gempa bumi dengan skala besar yang berpusat pada Samudera Hindia pernah terjadi di Yogyakarta, yaitu pada tanggal 19 Agustus 2004, 25 Mei 2011, 9 Juni 1992 dan 14 Maret 1981, dengan kekuatan antara 6 – sampai 6,5 SR (Wijoyono, 2016). Fakta geografis daerah Yogyakarta yang terletak di antara Samudera Hindia dan Gunung Merapi membuat daerah ini sebagai daerah rawan bencana dengan potensi ancaman yang sulit diprediksi.

Ancaman non-militer dari kondisi wilayah cincin api di Yogyakarta tidak hanya menimbulkan kerugian fisik, namun juga non-fisik. Masyarakat korban gempa tentu membutuhkan bantuan untuk mengembalikan aset materi mereka, agar segera bisa bangkit dengan sarana hidup yang memadai. Namun demikian akibat-akibat non-fisik, seperti trauma dan depresi seperti yang terjadi pada peristiwa gempa tahun 2006,

membutuhkan penanganan khusus. Rehabilitasi non-fisik lebih memerlukan waktu yang lama dan dana yang lebih besar.

Perlintasan Imigran Gelap

Aksesibilitas wilayah DIY yang strategis memunculkan potensi penyimpangan dalam bentuk aktivitas kejahatan lintas negara atau transnasional. Ancaman dari aktivitas kejahatan lintas negara telah lama ada, dan terus mengalami perkembangan sejalan dengan kemajuan teknologi dan perubahan peradaban. Kejahatan lintas negara semakin terorganisir, mengembangkan jaringan yang luas dengan memanfaatkan teknologi informasi, dan semakin sulit didteksi keberadaannya.

Kejahatan lintas negara yang mengancam Indonesia, tidak hanya rentan akibat tuntutan pasar bebas, namun juga rentan akibat luasnya perairan Indonesia. Salah satu kejahatan internasional yang marak terjadi adalah *people smuggling* atau *illegal immigrant* (Imigran Gelap). Bentangan luas samudera Hindia menyebabkan 70% jalur perdagangan menggunakan perairan ini. Terdapat dampak positif sebagai lalu lintas perairan yang cukup menguntungkan bagi percepatan distribusi barang dan jasa yang menggunakan transportasi laut, namun terdapat konsekuensi negatif dimana luasnya bentangan samudera Hindia dapat dimanfaatkan sebagai tempat terjadinya praktek tindakan kejahatan internasional sebagai jalur penyelundupan imigran gelap.

Dalam konteks ini, keberadaan samudera hindia di mana 160 km di antaranya merupakan garis pantai selatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kompas, 2017), memunculkan kerentanan terhadap pelintas batas ilegal. Pantai selatan DIY merupakan sebagai pintu masuknya imigran gelap baik yang diselundupkan secara sengaja (terorganisir) maupun yang tidak terorganisir. Para imigran yang tengah mencari suaka domisili bisa saja menyandarkan perahunya di garis pantai selatan Yogjakarta. Perbatasan oleh Samudra Hindia di sebelah selatan sebagai jalur favorit imigran gelap; pantai selatan bantul, gunungkidul ke Australia. Beberapa jalur yang biasa menjadi perlintasan laut para imigran gelap adalah Pantai Samas, Pantai Depok, Gesing, Kukup, serta Ngrenehan di Gunungkidul. Beberapa kasus telah terjadi di Yogyakarta sebagai daerah yang rawan dimasuki imigran gelap melalui jalur pantai selatan. Di antara kasus tersebut adalah ditangkapnya 25 imigran gelap asal Irak, Afganistan dan Myanmar (Okezone.com, 2017).

Secara sosiologis, keberadaan imigran gelap dapat menimbulkan distabilitas dan kerawanan sosial masyarakat. Beberapa kasus di negara lain kedatangan imigran gelap

telah membawa dampak negartif, seperti persoalan konflik dengan penduduk setempat, pengaruh ideologi yang dibawa para pendatang, dan kejahatan transnasional seperti narkoba dan perdagangan gelap.

Konflik Etnis

Sebagaimana telah dipaparkan di atas bahwa Yogyakarta menyandang predikat sebagai kota budaya, kota wisata, dan kota pelajar. Predikat pertama adalah daya tarik tersendiri dan alasan umum bagi banyaknya pendatang baru di Yogyakarta dengan latar belakang etnis berbeda-beda. Pembauran beragam etnis yang bermukim di Yogyakarta menyebabkan Yogyakarta sebagai wajah mini dari karakter multikultural Indonesia. Persentuhan masyarakat dengan latar belakang yang berbeda merupakan realitas kebudayaan yang sejalan dengan prinsip-prinsip budaya Indonesia di satu sisi, namun menyisakan kekhawatiran akan munculnya problem tentang konflik sosial disisi lain.

Ketika masing-masing etnis bertemu, tentu terdapat dua kecenderungan yaitu interaksi yang harmoni atau rukun di satu sisi, dan pada sisi yang lain terdapat interaksi yang diwarnai konflik. Interaksi antara pendatang dan pribumi tentu terus mengalami dinamika, dan karakter masing-masing etnis menentukan dinamika interaksi itu. Acapkali kebijakan yang disertai niat baik pemerintah daerah tidak tersosialisasikan dengan baik, sehingga kebijakan itu sering menimbulkan kecemburuan, terutama di kalangan etnis pendatang. Kekecewaan akibat perbedaan perlakuan dan perasaan identitas kelompok menjadi motif dasar suatu kelompok melakukan mobilisasi kekerasan terhadap kelompok lain (Guur, 1993: 124; Mas'oed, dkk., 2001: 9).

Tendensi konflik lebih besar dipicu oleh keberadaan pendatang baru yang menetap sementara di Yogyakarta sebagai mahasiswa dan pelajar. Keberadaan mahasiswa daerah yang mendapatkan fasilitas dalam bentuk asrama daerah dari pemerintah daerah masing-masing semakin menguatkan entitas dan identitas kedaerahan yang sulit dilepaskan oleh tiap-tiap pendatang baru. Interaksi yang cenderung ekslusif, menyebabkan kecurigaan antar etnis yang semakin menguat.

Kondisi tersebut juga menjadi salah satu indikator tentang indeks perdamaian dan kerukunan hidup antar etnis di Yogyakarta menurun. Slogan "Yogyakarta Berhati Nyaman" telah lama dirasakan secara nyata oleh masyarakatnya. Namun pada 2013 terdapat catatan konflik etnis yang terjadi. Sebagaimana diberitakan di harian Kompas (2013), terdapat kasus konflik etnis yang menyebabkan empat korban yang tewas di

dalam sel 5A Blok Anggrek Lapas Cebongan, Sleman, yang semuanya diketahui identitasnya sebagai penduduk beretnis Nusa Tenggara Timur (NTT). Tiga di antaranya tercatat sebagai warga asrama NTT di Jalan Tegal Panggung, Danuraejan-Yogyakarta. Peristiwa tersebut menyebabkan rasa prihatin Sultan Hamengkubowono X, dan beliau memandang bahwa keberadaan asrama etnis cenderung memunculkan egoisme kedaerahan dan potensial menimbulkan konflik .

Klitih dan Tawuran Siswa Sekolah

Permasalahan lain yang sering terjadi di Yogyakarta adalah klitih. Istilah klitih berasal dari kata "klitah-klitih" (Jawa) yang berarti mencari angin, mengisi waktu, mencari kesibukan di waktu senggang (Syafi'i, 2017: 4) Namun dalam perkembangannya istilah klitih mengalami gejala bahasa peyoratif, maknanya kemudian jadi memburuk karena identik dengan perilaku remaja yang mengisi waktu dengan berbuat meyimpang, kekerasan, dan permusuhan. Menurut Soeprapto kegiatan *nglitih* kemudian diberi pengertian mencari musuh dan melakukan aksi jahat (Majalah Pranala, 2017).

Meningkatnya "klitih" dan tawuran antar sekolah sering terjadi karena rasa solidaritas dan labilnya psikologis pelajar usia sekolah. Masa transisi remaja menyebabkan mereka sering menyebabkan keinginan tampil berbeda dengan budaya manstream, sehingga klitih muncul dari sub-kultur remaja. Sub kultur remaja menjadi semacam budaya tanding terhadap kultur yang mapan. Hal itu disebabkan dorongan psikologis dari masa peralihan remaja ke dewasa yang cenderung labil. Akibatnya tindakan remaja cenderung didorong oleh emosi subjektif ketimbang rasional rasional dan objektif. Klitih perwujudan dari sikap subyektif yang memandang teman dan kelompoknya sendiri dalam pihak yang benar, dan orang serta kelompok lain selalu salah.

Fenomena sosial tersebut terus berulang muncul terjadi di Yogyakarta. Prestasi pelajar Yogyakarta memang patut untuk diapresiasi, tetapi fenomena negatif yang ada seperti *klitih* dan tawuran pelajar terus menjadi fakta. Berdasarkan laporan dari kepolisian (*www.detik.com*, Kamis 29 Desember 2016) terjadi peningkatan jumlah kasus tawuran atau *klitih* di Yogyakarta pada tahun 2016, yaitu sebanyak 43 kasus. Klitih marak kembali di Yogyakarta pada tahun 2019 hingga 2020. *Klitih* dan tawuran pelajar menjadi bagian dari problem yang dapat meruntuhkan solidaritas generasi muda, dan menjadi bagian dari ancaman non-militer terhadap generasi muda di Yogyakarta.

Narkoba

Kasus peredaran gelap narkotika dan obat terlarang di Yogyakarta cenderung meningkat. Hal itu menjadi ancaman, karena perilaku menyimpang itu tidak hanya berdampak buruk bagi pelakunya, lebih dari itu juga membahayakan masyarakat (Santosa, dkk., 2017). Sebagai bentuk ancaman non militer, maka para pelaku yang umumnya adalah generasi muda, mahasiswa, dan pelajar perlu mendapat perhatian khusus. Darurat narkoba memang tepat disematkan untuk Indonesia, karena jumlah penyalahgunaan Narkotika telah mencapai 4,7 juta. Adapun tingkat kematian akibat penyalahgunaan narkoba mencapai 50 orang per hari. Sehingga tepat jika tindak pidana narkoba merupakan kategori kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) disamping korupsi dan terorisme.

Peredaran Narkoba di dunia dilakukan oleh sindikat antara lain dengan tujuan bisnis, politik, dan untuk menghancurkan eksistensi negara. Demikian juga peredaran Narkotika di Indonesia, tentu tidak hanya bertujuan sebagai bisnis semata, namun juga dilakukan oleh para sindikat Narkoba untuk menghancurkan Indonesia dari dalam, yaitu dengan cara merusak moral generasi muda. Narkoba sebagai kejahatan luar biasa juga ditandai oleh kondisi Indonesia saat ini yang menjadi pangsa pasar terbesar di Asean dalam peredaran narkotika. Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang harus mendapat perhatian khusus dalam menghadapi peredaran narkoba.

Menurut data terbaru, saat ini pelajar dan mahasiswa di Yogyakarta adalah pengguna narkoba terbesar di Indonesia. Berdasarkan kajian dan survei pada tahun 2014, Yogyakarta masuk peringkat 8 sebagai pengguna narkotika terbanyak di Indonesia. Namun, pada tahun 2016 setelah dilakukan survei oleh pemerintah pusat dan Universitas Indonesia, khusus untuk pelajar dan mahasiswa, persentase pengguna narkotika di Yogyakarta menempati peringkat satu. (*www.koranopini.com*, Kamis, 30 Maret 2017).

Di antara penyebab tingginya penggunaan narkotika di Yogyakarta adalah kenyataan akibat dari kondisi wilayah ini sebagai kota pelajar. Tentu sebagai kota pelajar, jumlah pelajar di Yogyakarta lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah pelajar di daerah lain. Di samping itu dengan banyaknya pelajar dan mahasiswa dari luar daerah, peredaran narkotika melalui rumah-rumah kost disinyalir lebih mudah dilakukan, dan sulit dipantau oleh kepolisian. Oleh karena sasarannya adalah mahasiswa dan pelajar, maka jenis narkotika yang banyak diedarkan di Yogyakarta adalah narkotika "pahe"

(paket hemat), yang umumnya lebih murah dibanding narkotika yang diedarkan melalui tempat-tempat hiburan di kota-kota besar.

Kesimpulan

Hasil kajian ini menemukan fakta terkait dengan potret kondisi wilayah Yogyakarta saat ini yang berpotensi dalam menanggulangi atau mereduksi ancaman non-militer. Sebaliknya juga terdapat masalah yang dapat mengakibatkan berkembangnya ancaman non-militer. Adapun potensi dari kondisi saat ini di Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain adalah kelestarian nilai-nilai budaya seperti gotong royong, seni budaya yang memiliki nilai filosofis untuk memperkuat pertahanan negara, dan nilai sejarah perjuangan dalam mempertahankan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Di samping itu Yogyakarta secara yuridis juga diuntungkan dengan adanya status keistimewaan dalam tata pemerintahan, yaitu sebagaimana termuat dalam Undang-undang No.13 tahun 2013. Status keistimewaan Yogyakarta menyebabkan konflik politik kepentingan di Yogyakarta juga dapat diminimalisir. Status keistimewaan memberi kesempatan lebih luas bagi rakyat dan pemimpin Yogyakarta untuk membangun wilayah tanpa tergantung dari kebijakan pusat. Dari status keistimewaan, provinsi DIY mendapat dukungan dana keistimewaan yang dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Yogyakarta.

Dari sisi ekonomi terdapat potensi daerah yang dapat dijadikan modal untuk meningkatkan status ekonomi masyarakat Yogyakarta. Di antara potensi ekonomi itu adalah perkembangan sektor pariwisata yang pesat, dan dibangunnya bandara internasional yang baru di Kabupaten Kulonprogo. Masyarakat Yogyakarta memiliki ethos kewirausahaan sebagaimana terdapat dalam jingle ekonomi sebagai masyarakat "among tani dagang layar". Sebagai wilayah yang menjadi tujuan utama untuk belajar, Yogyakarta juga memiliki potensi untuk meningkatkan pendapat ekonomi masyarakat, seperti terbukanya bisnis rumah kost, toko dan jasa layanan bahan belajar, warung makan, dan sumber-sumber pendapatan lainnya yang dapat dimanfaatkan dari sektor pendidikan.

Adapun beberapa masalah dari kondisi Yogyakarta yang menimbulkan ancaman non-militer, antara antara lain disebabkan oleh posisi geografis Yogyakarta yang berada di jalur cincin api. Sebagai wilayah cincin api, Yogyakarta rentan terhadap musibah alam seperti gempa bumi dan gunung meletus. Perkembangan wisata yang pesat, dan sebagai

daerah tujuan belajar pada satu sisi telah memberi dampak positif, namun pada sisi yang lain juga memberi dampak negatif. Di antara dampak negatif dari perkembangan wisata dan kota pelajar adalah peredaran narkoba. Mahasiswa dan pelajar di Yogyakarta menjadi target peredaran narkoba dari para sindikat narkoba. Banyaknya mahasiswa dan pelajar dari berbagai daerah dan beragam etnis juga menyebabkan wilayah ini rentan terhadap konflik yang bernuansa SARA, tawuran, perkembangan radikalisme dan neoliberalisme.

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa ancaman non-militer di wilayah Yogyakarta tidak hanya muncul akibat dari kondisi internal DIY. Fakta menunjukkan bahwa ancaman non-militer juga disebabkan oleh pengaruh eksternal yaitu arus globalisasi yang menimbulkan dampak multifaset. Globalisasi dengan motor kapitalisme telah membawa dampak bagi berkembangnya gaya hidup konsumtif dan budaya pop yang dalam beberapa hal dapat mereduksi nilai budaya lokal dan keindonesiaan yang adiluhung. Globalisasi juga mendorong penyebaran ideologi asing yang merusak nilai ideologi Pancasila.

Secara khusus kajian ini menemukan tiga bentuk ancaman militer di Provinsi DIY yang mendesak dan perlu mendapat perhatian, serta solusi kebijakan untuk menanggulanginya. Meskipun terdapat tiga bentuk ancaman militer yang mendapat perhatian khusus, bukan berarti bentuk-bentuk ancaman militer lainnya sebagaimana telah dipetakan dalam kajian ini tidak perlu mendapat perhatian. Hanya saja pengambil kebijakan perlu memberi prioritas khusus terhadap tiga bentuk ancaman yaitu radikalisme keagamaan dan ideologi anti Pancasila, narkoba, dan efek negatif virtual culture; seperti maraknya ujaran kebencian dan berita bohong) yang dapat merusak persatuan, karena menyebabkan keterbelahan bangsa.

Daftar Pustaka

Adorno, Th and Horkhieimer, M. (1979). *Dialectif of Enlightenment. translated by Cumming, J*. New York : Herder & Herder.

Ahnaf, M. Iqbal. 2016. *Isis, molenbeek dan Radikalisme Urban*. Yogyakarta: Artikel CRCS UGM.

Barker, Chris. (2011). *Cultural Studies: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Bentang Pustaka.

Baylis, John dan Smith, Steve (eds.). (2001). *The Globalization of World Politics, 2nd edition*. Oxford: Oxford University Press (2) Chap 7, 8, 9.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Badan Pusat Statistik. (2016). *Analisis Informasi Statistik Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Bappeda-BPS DIY.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2019). *Statistik Indonesia 2019*. Jakarta: BPS.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (2016). *Profil BNPB*. http://www.bnpb.go.id/home/sejarah.

Burchill, Scott & Linkater, Andrew. (1996). *Theories of International Relations*. ST Martin Press: New York.

Buzan, Barry, Ole Waever and Jaap de Wilde. (1998). *Security: A New Framework for Analysis*. Boulder: Lynne Rienner

Castells, Manuel. (1996). *The Rise of the Network Society: A Cross-cultural Perspective*. Oxford: Blackwell Publisher.

----------. (1996). "The Culture of Real Virtuality: the Integration of Electronic Communication, the End of the Mass Audience, and the Rise of Interactive Networks," dalam *The Rise of the Network Society*. Oxford:

Central Intellegence Agency. (2016). *CIA World Factbook 2016*. https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/.

Dasgupta, Sugata. (1968). "Peacelesness and Maldevelopment: A New Theme for Peace Research in Developing Nations," *Proceedings of the International Peace Research Association Second Conference*, Assen, The Netherlands: Koninklijke Van Gorcum & Comp. vol.2, p.19-42

Dinas Kebudayaan DIY. (2015). *Yogyakarta City of Philosophy*. Yogyakarta: Dinas Kebudayaan DIY.

Dwiyanto, Djoko. (2017). *Pemaknaan Keistimewaan DIY Antisipasi 2019*. Dewan Kebudayaan DIY. Ppt. Materi Dewan Kebudayaan DIY. Tidak Diterbitkan.

Engel, James F. dkk. (1994). *Perilaku Konsumen*. Jakarta: Binarupa Aksara.

Earl, Esther, et.al., (2014). *This Star Won't Go Out*. USA: Penguin Books.

Graham Murdock and Peter Golding. (1992). *Political Economy of Mass Comunication* (A Division of Holder & Stoughten).

Eriksen, Thomas Hyland. (2010). *Etnicity and Nationalism Anthropological Approach*. Third edition, London-Boulder, Colorado: Pluto Press.

Guur, Robert Ted. (1993). *Minorities at Risk; a Critical View of Ethnopolitikal Conflicts*. Washington DC: United States Institute of Peace Press.

Horkheimer, Max. (1997). *Critical Theory*. Continuum: New York

Horn, Stacy. (1998). *Cyberville: Clicks, Culture, and the Creation of an Online Town*. New York: Warner Books.

Horton, Paul B. dan Hunt, Chester L . (1996). *Sosiologi*. Jakarta: Erlangga.

Indrawan, Jerry. (2015). *Studi Strategis dan Keamanan*. Jakarta: Nadi Pustaka.

----------. (2016). "Ancaman Non-Militer Terhadap Keamanan Nasional di Papua". Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional PACIS. Vol.12 No.2.

Jackson, Robert dan Georg Sorensen. (1999). *An Introduction to International Relations*. Oxford: Oxford University PressJones, Steven. 1997. *Virtual Culture: Identity and Comunnication in Cybersociety*. London: Sage Publications.

Khairuddin, N. (1995). *Filsafat Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.

Kementerian Pertahanan Indonesia. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2015*. Jakarta: Kemhan.

Kelly, Phil. (2006). "A Critique of Critical Geopolitics". United Kingdom: Routledge Taylor & Francis Group, LLC, pp. 24-53

Leonard, Mark. (2015). *Geoeconomics* and 7 Challenges Globalization (online). dalam: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Geoeconomics_7_Challenges_Globalization_2015_report.pdf(diakses pada 9 Mei 2016)

Marx, Karl. (1977). *Selected Writing,* ed. David Mclellan, Oxford: Oxford University Press.

Mas'oed, Mochtar., Maksum, Mochammad., dan Soehadha, Moh. (2001). *Kekerasan Kolektif Kondisi dan Pemicu*. Yogyakarta: P3PK UGM.

Matsuo, Masatsugu. (2005). *Peace and Conflict Studies: A Theoretical Introduction*. Hiroshima: Keisuisha

Miles, Matthew B. and Hubberman A. Michael. (1994). Data Management and Analysis Methods. In Denzim, Norman K. and Lincoln (edt). *Hanbook of Qualitative Research*. California: Sage Publication Inc.

Morissan dan Andy Corry Wardhani. (2009). *Teori Komunikasi: tentang Komunikator, Pesan, Percakapan dan Hubungan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Mosco, Vincent. (1996). *The Political Economy of Communication: Rethinking and Renewal*. London: Sage Publication.

Naryadi. (2005). *Keamanan Nasional Suatu Upaya Pemahaman*. Bandung 4 Mei 2005, hal 9. Makalah Seminar. tt

Rozi, Safuan. (2003). "Mendorong Laju Gerakan Multikulturalisme di Indonesia." *Masyarakat Indonesia Majalah Ilmu-ilmu Sosial Indonesia*. Jilid XXIX, No.1

Roberts, Susan et. al. (2003). *Neoliberal Geopolitics*. Oxford : Blackwell Publishing.

Rubaidi, A. (2008). *Radikalisme Islam, Nahdlatul Ulama dan Masa Depan Moderatisme Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Logung Pustaka bekerjasama dengan LTNU PWNU Jawa Timur.

Spinger, Simon, (2013). "Neoliberalism", dalam *The Ashgate Reasearch Companiaon to Critical Geopolitic*. England: Ashgate Publishing Limited.

Santosa, Edy. Soehadha, Moh. Suprianto, Heri. Astuti, Nurcahyo Budi. dan Satria, Arif. 2017. *Kajian Sinergitas Pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta Guna Menghadapi Ancaman non-militer dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan Ketahanan Negara*. Laporan PTT Kemhan DIY.

Satrinati, Dominic. (2003). *Popular Culture – Pengantar Menuju Teori Budaya Populer*. Yogyakarta: Bentang Budaya.

Soemardjan, Selo. (1982). *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Komunitas Bambu,.

Soehadha, Moh. (2013). *Belajar dari Negeri Cina: Reaktuaisasi Etos Kerja Islam*. Opini Kedaulatan Rakyat 5/8.

Sudibyo, Bambang. (2013). *Potret Pergeseran Geoperadaban, Geoekonomi, dan Geopolitik Abad 21*. Makalah Seminar " Reaktualisasi Etos Kerja Islam dan Pergeseran Geopolitik Cina", 5 Agustus. Yogyakarta: Majelis Trajih dan Tajdid PP. Muhammadiyah.

Syafi'i, M. (2017). Klitih: Krisis Lingkungan Sosial. *Majalah Pranala*. Edisi 14, Maret-April.

Taylor, S., & Bogdan. (1984). *Introduction to Qualitative Research Methods: The Search for Meanings*. 2end ed. Toronto: John Wiley & Sons.

Tim Peneliti UIN Sunan Kalijaga. (2011). *Ketahanan Kepribadian Mahasiswa DIY terhadap Sikap Eklusivisme Keagamaan*. Yogyakarta: Laporan Penelitian tt.

Wardlaw, Grant. (1982). Political Terorism: Theory, Tactics and Countermeasures. Cambrige University Press.

Wallerstein, I. (1975). *The Modern World System. Capitalist Agriculture and The Origins of European World Economy in The Sixteenth Century*. New York: Academic.

Wijoyono, Erlanto. (2016). Pelestarian jejak Bencana sebagai Pusaka peradaban. https://elantowow.wordpress.com/2016/03/05/pelestarian-jejak-bencana sebagai-pusaka-peradaban/#more-874

Woodward, Mark R. (2000). *Islam Jawa: Kesalehan Normatif versus Kebatinan*. Yogyakarta: Penerbit LKiS

Internet dan Media Cetak
Berita Interfidei, 2016
https://cpps.ugm.ac.id/siaran-pers-masyarakat-yogyakarta-menilai-aksi-premanisme-dalam-dua-tahun-terakhir-meningkat/
https://infogunungkidul.com/detail.php?id=1585
https://kumparan.com/nur-khafifah/bnn-narkoba-baru-jenis-flaka-mulai-masuk-ke-indonesia
http://wartakota.tribunnews.com/2017/09/14/apa-itu-pil-pcc-ini-penjelasan-bnn
http://www.beritasatu.com/blog/tajuk/4423-narkoba-kejahatan-luar-biasa.html
https://www.solopos.com/. NARKOBA JOGJA : BNNP DIY Targetkan Kurangi Pengguna, Bagaimana Caranya? Kamis, 19 Januari 2017 | 02:20 WIB
Harian Kedaulatan Rakyat 15/9/2017
Kompas.com - 10/03/2017, 23:48 WIB
Kompas, 15 Agustus 2010.
Majalah Hadila, Januari 2017
Republika, 15 Agustus 2010.
Tempo 30/8/2017
www.jogjabudaya.com. dikutip tanggal 15 september 2017
www.koranopini.com, Kamis, 30 Maret 2017

© 2021 by the authors. This article is an open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution -ShareAlike 4.0 International (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).